

Press Release

10 Oktober 2018

Urban Transport Discussion #9

“Buah Manis Ganjil Genap”

Jakarta – Institute for Transportation Development Policy (ITDP) merupakan lembaga nirlaba yang sudah berdiri sejak tahun 1985 dan berkantor pusat di New York AS dengan fokus utama menciptakan transportasi yang berkelanjutan di kota-kota di dunia. Selain telah memberikan bantuan teknis selama lebih dari sepuluh tahun kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Medan dan Semarang mengenai angkutan umum massal, sistem perpustakaan dan perbaikan fasilitas pejalan kaki, ITDP Indonesia juga berusaha memberikan edukasi serta wadah bagi masyarakat umum untuk turut serta memberikan solusi bagi isu-isu seputar perkotaan dan transportasi dengan menyelenggarakan Urban Transport Discussion.

Urban Transport Discussion adalah sebuah diskusi publik terbuka mengenai isu transportasi dan perkotaan yang diadakan oleh ITDP Indonesia sejak awal tahun 2017. Urban Transport Discussion yang diadakan pada Kamis, 10 Oktober 2018 mengangkat tema “Buah Manis Ganjil Genap”. Narasumber yang turut dalam diskusi ini adalah Budi Kaliwono (Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta), Bambang Prihartono (Kepala BPTJ) dan AKBP Budiyanto (Kasubdit Gakkum Ditlintas Polda Metro Jaya). Dalam pembukaan diskusi, ITDP Indonesia menyampaikan data mengenai kebijakan perluasan ganjil-genap yang berlangsung selama perhelatan Asian Games 2018 dan akan berakhir setelah Asian Para Games 2018 selesai.

AKBP Budiyanto, selaku Kasubdit Gakkum Ditlintas Polda Metro Jaya mengatakan sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009, kebijakan ganjil genap berkaitan dengan program pembatasan lalu lintas. Ia juga mengungkapkan bahwa adanya kebijakan ganjil-genap muncul dari evaluasi kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan 3 in 1. “Dulu ada kebijakan 3 in 1, setelah dievaluasi kebijakan ini memiliki beberapa kelemahan dan menimbulkan permasalahan sosial seperti joki, perampasan, eksploitasi anak. Berdasarkan itu, kami memberi rekomendasi ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk merubah kebijakan 3 in 1 menjadi kebijakan ganjil genap, di Sudirman-Thamrin dan sebagian Gatot Subroto hari Senin-Jumat. Bersamaan dengan pelaksanaan Asian Games, kebijakan ini diperluas baik jangkauan dan jangka waktunya. Setelah dievaluasi, kebijakan ini dilakukan perpanjangan menjelang Asian Para Games,” papar Budiyanto.

Narasumber berikutnya, Bambang Prihartono selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung kebijakan ganjil genap. Ia mengatakan kebijakan ganjil genap adalah kebijakan *push* (mendorong) masyarakat untuk beralih ke angkutan umum dan merubah gaya hidup, terutama bagi anak muda. “Dengan dampak yang lumayan positif, Menteri Perhubungan mengarahkan munculnya kebijakan ganjil genap sebagai kebijakan nasional di 6 kota aglomerasi. Saat ini, kota kedua yang diimplementasikan kebijakan ganjil genap setelah DKI Jakarta adalah Kota Denpasar, dalam rangka IMF,” ungkap Bambang. Ia juga menekankan bahwa pentingnya reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini demi menentukan masa depan kebijakan ini setelah Asian Para Games karena pergub berakhir tanggal 13 Oktober 2018.

Budi Kaliwono, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta), sebagai salah satu narasumber juga mengamini dampak positif dari kebijakan ganjil genap dan mengakui bahwa kecepatan rata-rata Bus Transjakarta meningkat setelah penerapan kebijakan ganjil genap. “Peningkatan penumpang Transjakarta tidak hanya terjadi di koridor yang terpengaruh dengan efek ganjil genap, namun semua koridor dan layanan non BRT. Saat melayani Asian Games, bus Transjakarta turut melayani di dalam venue GBK (bus shuttle), orang jadi merasakan naik bus Transjakarta dan harapannya para penumpang bisa ketagihan kemudian lanjut naik seterusnya. Hal ini dibuktikan dengan penumpang Transjakarta yang tidak menurun walaupun kebijakan ganjil genap sempat diberhentikan sementara,” jelas Budi Kaliwono.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, yang hadir sebagai salah satu peserta diskusi juga mengakui dampak positif dari kebijakan ganjil genap, dimana kecepatan rata-rata di ruas DKI Jakarta naik 5% menjadi 21 km/jam. Ia juga mengatakan bahwa tugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah memitigasi titik jenuh dari kebijakan ini. “Dengan adanya mitigasi titik jenuh, kami berharap masyarakat yang sudah beralih ke kendaraan umum jadi berpindah lagi ke kendaraan pribadi, apalagi bergeser ke kendaraan beroda dua (motor),” papar Sigit.

Sebagai penutup diskusi, ITDP Indonesia percaya bahwa walaupun menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat, kebijakan ganjil-genap di beberapa segmen jalan utama Jakarta dianggap efektif dalam menekan angka kendaraan pribadi di segmen tersebut, serta meningkatkan jumlah pengguna serta performa layanan transportasi publik. Selain pemerintah yang terus mendorong kebijakan ini, respons dari masyarakat juga penting untuk kesuksesan dan keberlakuan kebijakan ganjil dan genap.

Kontak Media

Fani Rachmita, 081286237694 / fani.rachmita@itdp.org

The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) bekerja di seluruh dunia untuk merancang dan mengimplementasikan sistem transportasi yang berkualitas tinggi dan juga kebijakan-kebijakan yang dapat membuat kota menjadi lebih hidup, lebih layak untuk ditinggali dan berkelanjutan.

ITDP adalah lembaga nonprofit yang terdepan dalam inovasi dan menyediakan keahlian teknis untuk mengakselerasi pertumbuhan transportasi berkelanjutan dan perkembangan perkotaan di seluruh dunia. Melalui proyek transportasi, pembuatan kebijakan dan publikasi penelitian, kami bekerja untuk mengurangi emisi karbon, menambahkan inklusi sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga perkotaan.

www.itdp-indonesia.org | facebook.com/ITDP Indonesia | [Twitter](https://twitter.com/ITDPIndonesia) & [Instagram](https://instagram.com/ITDPIndonesia): @itdpindonesia